

Analisis Pengaruh Kebijakan *Extended Deterrence* Dalam Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur

Nizar Lukman¹, Mala Mardialina¹, Khairur Rizki¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
nizarlukman97@gmail.com

ABSTRACT

The United States-South Korea alliance was formed due to security imbalances and the vulnerability of conflicts in the East Asian region. The alliance agreed and implemented a defense policy called Extended Deterrence which had the main objective to overcome nuclear threat from North Korea. This research uses a conceptual framework of balance of power and regional security complex that aims to answer whether the policy has an influence on the security of East Asia for the better or more complex. This research is a qualitative-descriptive research, where the data are sourced from books, journals, theses and official websites. This research concludes that the implementation of the policy is one of the factors that hinder the formation of collective security in the region, where it could have provided satisfactory security stability, caused by the enmity relations pattern among the East Asian countries.

Keywords: Alliance, Extended Deterrence Policy, Nuclear Threat, Security Stability.

ABSTRAK

Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan terbentuk atas dasar ketidakseimbangan keamanan dan kerentanan konflik di kawasan Asia Timur. Aliansi tersebut menyetujui dan menerapkan kebijakan pertahanan yang disebut *Extended Deterrence*, dimana tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual *balance of power* dan *regional complex security* yang bertujuan untuk menjawab apakah kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap keamanan Asia Timur menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan sumber data berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis serta berbagai laman website resmi di internet. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan ini menjadi salah satu faktor utama penghambat terbentuknya pengaturan keamanan bersama di kawasan, dimana akan berujung pada stabilitas keamanan yang baik, sebab adanya pola hubungan *enmity* yang terjadi di antara negara-negara Asia Timur.

Kata Kunci: Aliansi, Ancaman Nuklir, *Extended Deterrence Policy*, Stabilitas Keamanan.

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang memiliki dinamika dalam hubungan regionnya, dimana setiap negara memiliki karakter dan sejarah yang berbeda-beda. Masalah keamanan yang terjadi di kawasan tersebut pun sangat kompleks. Tidak hanya masalah keamanan tradisional yang menitik beratkan pada keamanan negara, perbatasan negara, ancaman militer tetapi juga mencakup keamanan non tradisional, baik yang bersifat *high politics* hingga *low politics*. Faktor sejarah, ideologi serta karakter tiap negara yang berbeda di Asia Timur menjadi latar belakang mengapa di kawasan tersebut tidak dijumpai regionalisme yang konkrit maupun kerjasama yang komprehensif.

Sejarah panjang di Asia Timur tidak terlepas dari adanya Perang Dunia serta Perang Dingin yang terjadi, dimana perang tersebut menyebabkan perpecahan di antara negara-negara kawasan Asia Timur. Perkembangan negara-negara di Asia Timur sering dihadapkan dengan kolonialisme Barat. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat memiliki peran yang sangat besar di Asia Timur yang kemudian membuat Asia Timur berada dalam genggaman Amerika Serikat. Sebelum itu pula telah terjadi kolonialisme di antara negara-negara kawasan Asia Timur yaitu Jepang sebagai negara kolonialis yang menjajah beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti China, Korea, Taiwan dan lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan hubungan di dalam kawasan Asia Timur menjadi cukup tegang (Chalermphanupap, 2012).

Hubungan *enmity* atau rivalitas di antara negara-negara kawasan Asia Timur cukup tegang terutama sejak berakhirnya Perang Dunia yang dipengaruhi faktor sejarah dan kepentingan yang menjadikan hubungan di kawasan tersebut muncul dengan cukup kompleks seperti yang paling utama antara China dan Jepang serta antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pecahnya Korea menjadi dua negara yang berbeda pada tahun 1950-an merupakan awal mula memanasnya hubungan antar negara di kawasan Asia Timur sebab hal tersebut berkaitan dengan rivalitas Amerika Serikat dan Rusia dalam menyebarkan dua ideologi besar yaitu Liberal dan Komunis. Adanya tindakan invasi dari Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea / DPRK*) ke Korea Selatan (*Republic of Korea / ROK*) yang pada akhirnya memunculkan Perang Korea pada tahun 1950-1953 dan kemudian berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 yang ditandai dengan *Korean War Armistice Agreement* yang ditandatangani oleh Amerika Serikat-PBB di satu pihak dan China-Korea Utara pada pihak lainnya (Ahya, 2013).

Korea Selatan melakukan tindakan strategis dalam meningkatkan potensi dan kekuatan militernya dengan membentuk aliansi dengan Amerika Serikat melalui sebuah perjanjian kerjasama keamanan antara kedua negara tersebut yang disebut perjanjian *Mutual Defense Treaty*. Perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian yang dimulai sejak 1953 tepatnya pasca Perang Korea yang mana *Mutual Defense Treaty* merupakan sebuah simbol pertahanan dan keamanan dimana perjanjian tersebut berisikan Amerika Serikat akan mempertahankan kehadirannya di Korea Selatan (membangun pangkalan militer) serta berkomitmen untuk membantu Korea Selatan untuk mempertahankan diri (*United State Forces Korea, 1953*).

Aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini telah bersepakat dan dengan gencar akan saling melindungi satu sama lain, jika salah satu negara diserang atau diancam maka pihak lainnya akan membantu dan menanggulangi hal tersebut. Aliansi ini berdiri sebagai sebuah tanggapan serius terhadap keamanan dan konflik di Semenanjung Korea. Peluang Korea Selatan diserang oleh Korea Utara sangat besar sehingga pada akhirnya Amerika Serikat menjadi payung keamanan Korea Selatan, tidak hanya itu latar belakang terbentuknya aliansi ini disebabkan adanya ekspansi paham komunis secara besar-besaran di kawasan Asia oleh Uni Soviet sehingga pada masa itu aliansi didirikan dengan tujuan untuk membendung dan mengurangi ekspansi paham komunis tersebut.

Hal di atas dikatakan sebagai ancaman yang sangat berbahaya sehingga dalam aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tersebut sangat banyak upaya, tindakan dan kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai

keamanan strategis dan terhindar dari ancaman, terutama ancaman dari nuklir Korea Utara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang terdapat dalam kebijakan tersebut yaitu *Extended Deterrence* yang pada dasarnya ditujukan untuk permasalahan nuklir Korea Utara, selain itu juga *Extended Deterrence* ini memiliki tujuan agar tidak terjadi konflik atau peperangan secara militeristik dengan skala yang besar di antara kedua negara Korea. Selama beberapa dekade, senjata nuklir telah menjadi elemen utama dalam urusan internasional di kawasan Asia Timur, senjata nuklir sendiri menjadi landasan sistem ancaman bipolar yang kaku berdasarkan pada pencegahan strategis dan terorganisir di seputaran keseimbangan teror global dan sudah menjadi hal yang biasa jika senjata nuklir dijadikan sebagai sebuah proyeksi ancaman terutama di kawasan Asia Timur (O'Neill, 2011).

Kebijakan *Extended Deterrence* pun dikatakan sebagai sebuah strategi pertahanan persuasif yang memiliki tujuan untuk mempertimbangkan posisi sekutu atau aliansi sebagai elemen penting kekuatan suatu negara untuk menundukan negara lain agar tidak membawa ancaman bagi sekutu suatu negara. Kebijakan ini pun memiliki substansi yaitu untuk meningkatkan pertahanan melalui aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan Korea Selatan dan kondisi keamanan di semenanjung Korea dari berbagai ancaman terutama dari ancaman nuklir Korea Utara.

Dengan adanya kebijakan ini tentu saja negara-negara lain di kawasan tidak tinggal diam terutama Korea Utara. Pemerintah Korea Utara menuntut penarikan tentara Amerika Serikat dari Korea Selatan dikarenakan Korea Utara menganggap bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan provokatif untuk menunjukkan kekuatan pertahanan dan keamanan kedua negara sekutu tersebut dalam menjaga keamanan dan ancaman senjata nuklir Korea Utara. Tidak hanya itu dengan adanya aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan di kawasan Asia Timur tersebut tentu saja akan membuat gejolak atau ketidakseimbangan di kawasan, terlebih lagi dengan adanya kebijakan *Extended Deterrence* tersebut, dikhawatirkan akan membawa pengaruh terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur sebab negara-negara yang memiliki hubungan *enmity* seperti China dan Korea Utara tidak akan tinggal diam melihat hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai bahan referensi dari berbagai buku, jurnal dan tesis yang berkaitan dengan tema dari penulisan karya ilmiah ini yang sekiranya memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga bisa dijadikan bahan referensi yang dapat membantu penelitian ini, tulisan-tulisan tersebut diantaranya:

Pertama, sebuah artikel dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan *Extended Deterrence* Amerika Serikat Terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea", ditulis oleh Selly Meilianawati diterbitkan dalam jurnal Hubungan Internasional (Meilianawati, 2017). Dalam tulisan ini penulis menggambarkan secara terperinci latar belakang pecahnya Korea kemudian menggambarkan pula tentang aplikasi dari kebijakan *Extended Deterrence* yang diberlakukan oleh aliansi namun dalam skala kecil yaitu Semenanjung Korea sehingga

arah penelitian dan pengaruhnya pula hanya berpusat pada Semenanjung Korea, baik pengaruh internal maupun pengaruh eksternal dari kebijakan tersebut. Konsep yang digunakan pula berfokus pada *deterrence* dan *security dilemma* yang digunakan sebagai pisau analisisnya, dan hasil penelitiannya memuat tentang Korea Selatan yang melakukan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat dalam melindungi keamanan negara sekutunya sebagai perwujudan dari *Extended Deterrence*.

Berkaitan dengan adanya pengembangan nuklir Korea Utara membuat pihak Amerika Serikat turun tangan dalam melindungi negara aliansinya yaitu Korea Selatan dengan kerja sama pertahanan melalui peningkatan kapabilitas militer dan dengan melakukan aliansi militer yang meliputi latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan dimulai sejak tahun 2001-2017 di sekitar perbatasan dan latihan perang gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Selain itu adapun bantuan militer Amerika Serikat dan peningkatan militer Korea Selatan selain penempatan personel militer Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan, pihak Amerika Serikat juga memberikan bantuan kendaraan-kendaraan militer.

Pada intinya tulisan ini memunculkan hipotesis sesuai dengan ekspektasi berbagai ahli yang mana dengan adanya kebijakan *Extended Deterrence* tersebut menimbulkan *security dilemma* di kawasan sehingga ada pula tindakan perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh Korea Utara untuk menyikapi kebijakan tersebut. Jika dilihat lebih jauh sebenarnya terdapat dilema masing-masing dari pihak yang berbeda yang mana kekhawatiran akan ancaman terus muncul. Amerika Serikat dan Korea Selatan berpandangan bahwa nuklir Korea Utara membawa ancaman bagi stabilitas keamanannya sedangkan Korea Utara pula berasumsi bahwa adanya aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan terutama dengan adanya kebijakan *Extended Deterrence* tersebut akan membawa ancaman pula bagi Korea Utara.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu pertama mengenai skala atau lingkup, penelitian penulis akan memiliki lingkup yang lebih luas mencakup seluruh Asia Timur, selain itu pula penelitian ini akan menampilkan respon apa saja yang mungkin diberikan oleh negara-negara lain terhadap kebijakan dan aliansi antara Amerika Serikat-Korea Selatan tersebut. Kemudian, perbedaan lainnya mengenai konsep, jika dalam tulisan ini konsep yang digunakan fokus kepada *deterrence*, maka akan berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Selain konsep *deterrence* tersebut, konsep aliansi sebagai tokoh utama juga akan diamati dan dijabarkan sehingga hasil penelitian tidak sebatas pengaruh dari kebijakan itu saja, akan tetapi akan menarik jika melihat pengaruh keberadaan aliansi tersebut di kawasan Asia Timur.

Kedua, sebuah buku yang berjudul *Implications for US Extended Deterrence and Assurance in East Asia* yang ditulis oleh Shane Smith (Smith, 2015). Dalam buku yang dituliskan oleh Shane ini memuat sangat banyak hal mengenai kebijakan *Extended Deterrence* mulai dari bagaimana latar belakang, aplikasinya serta konsekuensi dari kebijakan ini. Pada intinya, Smith menggambarkan bahwa implikasi *Extended Deterrence* yang dilakukan Amerika Serikat ini merupakan upaya untuk meminimalisir ancaman dari nuklir Korea Utara dimana bentuk-bentuknya cukup beragam, salah satunya adalah dengan sebuah ancaman ataupun yang berkaitan dengan asuransi atau jaminan.

Jika Korea Utara terus melanjutkan untuk mengembangkan nuklirnya baik dalam kualitas maupun kuantitasnya maka tekanan dari kebijakan *Extended Deterrence* Amerika Serikat pula akan semakin meningkat. Setiap ukuran, jenis, bentuk maupun karakter persenjataan atau pertahanan yang dimiliki Korea Utara memiliki konsekuensi tersendiri. Amerika Serikat dengan kebijakan tersebut dapat dikatakan cukup membatasi pergerakan Korea Utara, namun Amerika Serikat tentunya mendapat dukungan dari Korea Selatan sebagai aliansinya. Sehingga kepentingan kedua negara tersebut haruslah sama-sama terpenuhi. Salah satunya adalah dengan mengekang Korea Utara dan mengurangi ancaman dari nuklirnya.

Buku ini tentu saja memberi banyak sumber mengenai kebijakan yang akan penulis teliti, namun memiliki beberapa perbedaan yaitu penelitian penulis selain mengaitkan kebijakan tersebut dengan Asia Timur juga akan membahas mengenai pengaruh dari kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan tersebut mungkin dapat menciptakan ancaman yang kemudian memunculkan *security dilemma*. Selain itu, buku tersebut tidak memfokuskan kebijakan *Extended Deterrence* yang dilakukan oleh aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat namun hanya fokus pada Amerika Serikat sebagai individu yang menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan aliansi menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan tersebut serta melakukan upaya-upaya strategis untuk terhindar dari ancaman nuklir Korea Utara.

Ketiga, sebuah artikel dalam jurnal yang berjudul Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara, ditulis oleh Soni Irawan dalam jurnal *International & Diplomacy* (Irawan, 2017). Dalam tulisan Soni Irawan ini terdapat beberapa gambaran yang cukup jelas mengenai latar belakang didirikannya *triple alliance* antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, selain itu dijelaskan pula mengenai ancaman utama bagi aliansi tersebut yaitu kemunculan nuklir Korea Utara, perkembangan hingga adanya uji coba dari nuklir tersebut.

Perubahan yang terjadi dalam *triple alliance* tersebut dipengaruhi oleh adanya ancaman yang berbeda dimana Aliansi pertahanan trilateral yang dilaksanakan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan melakukan upaya untuk menelaah lebih jauh bahwa untuk menghadapi nuklir Korea Utara dibutuhkan penanganan mengenai geostrategi dan perluasan sebab dalam hal perkembangan nuklir Korea Utara tersebut tidak terlepas dari pengaruh China sebagai *The Rising Power of Asia*. Dengan demikian, pembangunan paradigma kerja sama yang komprehensif bagi pemenuhan kepentingan keamanan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan merupakan hal yang utama digunakan ketika Amerika Serikat menyadari bahwa isu nuklir Korut bukanlah fenomena yang berdiri sendiri dan membutuhkan model aliansi pertahanan trilateral.

Artikel ini dengan tulisan yang akan peneliti lakukan memiliki beberapa persamaan yaitu fokus pada upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan negara dan sekutu dari ancaman nuklir Korea Utara, namun dalam artikel ini upaya yang dilakukan tidak hanya pada upaya militer akan tetapi melibatkan perihal ekonomi seperti adanya sanksi embargo bagi Korea Selatan yang dilakukan Amerika Serikat. Persamaan lain terletak pada adanya upaya tiap negara melakukan *balancing* dimana Korea Selatan dan Jepang melakukan

balancing dengan Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara melakukan *balancing* dengan bersekutu dengan China dan Rusia serta melakukan pengembangan terhadap nuklirnya.

Adapun hal yang membedakan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tinjauan utama dalam tulisan ini akan fokus membahas kebijakan *Extended Deterrence* yang dilakukan oleh aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan serta bagaimana kebijakan tersebut memberikan pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur, serta akan memunculkan pula respon-respon dari beberapa negara yang terancam dengan aliansi tersebut beserta kebijakannya. Selain itu, tulisan yang akan peneliti lakukan menggunakan konsep *deterrence* sebagai konsep yang paling utama untuk menjawab pertanyaan penelitian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan cara analisis deskriptif yang berupa data-data tertulis dari berbagai sumber berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis serta berbagai laman website resmi di internet. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Permasalahan pada rumusan masalah akan dijawab melalui beberapa konsep, selain itu akan dijelaskan pula pada pembahasan yang berupa deskriptif pada bab berikutnya.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam empat cara yaitu; Observasi (pengamatan), interview (wawancara), Kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada lebih banyak pada observasi, dokumentasi dan wawancara secara intens.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam melihat peristiwa ataupun isu berdasarkan pemaparan di atas, dibutuhkan sebuah pendekatan berupa teori atau konsep yang dapat dijadikan sudut pandang atau pisau analisis sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini akan memberikan hasil yang jelas dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu isu di atas sangat erat dan dapat dikaji dengan beberapa konsep sebagai berikut:

BALANCE OF POWER

Menurut Morgenthau, *Balance of Power* adalah suatu keadaan nyata dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beberapa banyak negara (Morgenthau, 2010, p. 3). Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Mohtar Mas'ood dalam bukunya, yang mengatakan *Balance of Power*. "*Sebagai suatu ekuilibrium, dimana variabel-variabel utamanya begitu erat, sehingga perubahan di satu variabel pasti akan menimbulkan perubahan di variabel lain*" (Mas'ood, 1990, p. 135). Dapat disimpulkan berdasarkan kedua pandangan tersebut yaitu suatu negara secara otomatis akan menyesuaikan diri jika ada peningkatan kekuatan pada negara lain dalam sistem itu dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka sendiri. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa selama masih ada distribusi sumber daya yang cukup

seimbang di antara lima atau lebih aktor, kebijaksanaan mereka akan tetap moderat dan upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangannya.

Dalam penelitian ini, melihat salah satu cara untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Timur pasti ada upaya untuk menjalankan *Balance of Power* oleh negara-negara di kawasan Asia Timur. Dalam hal tersebut sangat jelas bahwa negara yang melakukan tindakan ini adalah Korea Utara dimana dengan meningkatkan kapabilitas militer dan mengembangkan nuklirnya Korea Utara ingin mengurangi adanya ancaman khususnya ancaman dari Amerika Serikat sebagai musuh terbesarnya. Negara yang terancam akan cenderung melakukan *Balance of Power* atau perimbangan kekuatan untuk membendung maupun melindungi dirinya dari negara lain maka dalam menyikapi tindakan yang dilakukan Korea Utara, negara-negara sekitarnya seperti Jepang dan Korea Selatan pula yang terancam melakukan hal yang sama dengan meningkatkan teknologi dan kapasitas militernya yang dari hal tersebut diketahui bahwa pola hubungan baik bersifat positif maupun negatif telah terbentuk di kawasan Asia Timur.

Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana sebenarnya *Balance of Power* yang terjadi di kawasan Asia Timur, hal ini cukup kompleks dimana setiap negara hanya menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah usaha untuk melindungi diri sedangkan negara lain menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Hal inilah yang terjadi di kawasan Asia Timur, Korea Utara sebagai negara yang perekonomiannya lemah sejak berakhirnya Perang Korea memulai untuk menjalankan industri nuklir yang tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan dan keamanan negaranya dari ancaman yang mungkin muncul dari Amerika Serikat pada masa itu.

REGIONAL SECURITY COMPLEX

Regional Security Complex di sebuah kawasan berdasarkan teori Hubungan Internasional tradisional menyatakan bahwa sistem global terdiri dari individu atau unit yang semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi dinamika sistemik sebab hal tersebut merupakan realitas yang selalu ada. Tingkat ketergantungan di dalam lingkungan regional lebih dominan dibanding dalam skala global. Keamanan regional telah menjadi semakin otonom berdasarkan dua asumsi dasar yaitu wilayah tersebut masih merupakan unit utama dari dinamika keamanan internasional dan merupakan unit yang koheren dalam analisis keamanan internasional pada saat Perang Dingin (Cruden, 2011).

Dalam kaitannya dengan Asia Timur, sehubungan dengan sulitnya kawasan Asia Timur untuk membentuk sebuah kerja sama komprehensif tanpa bantuan pihak asing, Barry Buzan memiliki pendapat bahwa kerjasama regional di kawasan Asia Timur tidak dapat berkembang tanpa keberadaan hegemoni (*great power*) di kawasan. Seperti yang telah diketahui bahwa Amerika Serikat sebagai pihak luar yang memiliki hegemoni di kawasan Asia Timur, China dan Jepang sebagai negara dominan di kawasan memiliki posisi yang seimbang sehingga akan sulit untuk menciptakan *security management*, karena setiap negara ingin memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Oleh karena itu akan sangat sulit menciptakan kerjasama khususnya kerja

sama keamanan di kawasan Asia Timur tanpa campur tangan pihak eksternal atau negara di luar Asia Timur.

Dalam tulisan ini, *Regional Security Complex* menjadi cukup penting sebagai alat analisis untuk melihat segala aktifitas di kawasan Asia Timur baik upaya *balancing*, Kerjasama hingga permusuhan yang terjadi di Asia Timur yang akhirnya membentuk pola hubungan, baik *amity* maupun *enmity* yang terjadi dipengaruhi adanya kebijakan *Extended Deterrence* antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Berdasarkan pola hubungan yang terbentuk akan ditemukan hasil apakah stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur menjadi lebih baik atau buruk dengan keberadaan kebijakan *Extended Deterrence* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGARUH KEBIJAKAN *EXTENDED DETERRENCE* TERHADAP STABILITAS KEAMANAN ASIA TIMUR

Pada dasarnya kondisi keamanan di kawasan Asia Timur cukup tegang disebabkan hubungan yang dominan konflik di antara negara-negara kawasan terutama antara Korea Utara dan Korea Selatan yang pada awalnya merupakan satu Korea kemudian pecah dikarenakan kepentingan pihak lain. Selain itu pula ada kubu-kubu di dalam kawasan yang menimbulkan ketidakstabilan tersendiri yaitu Korea Selatan bersama Amerika Serikat dan Jepang dengan paham demokrasi serta Korea Utara bersama Rusia dan China dengan paham komunis yang sama.

Berdasarkan *Regional Security Complex*, kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang cukup unik dan kompleks sebab belum ditemukan kerjasama keamanan yang komprehensif di antara negara-negara kawasan, sebab terlalu banyak hambatan, bahkan hingga hari ini regionalisme belum bisa terwujud di kawasan Asia Timur. Sebelumnya telah ada wacana tentang pembentukan regionalisme di kawasan Asia Timur, namun selalu mengalami kegagalan disebabkan banyaknya perbedaan dan gesekan antara negara-negara Asia Timur (Mardialina, 2014, pp. 336–337). Perlu diketahui bahwa kondisi keamanan di Asia Timur sebelum diterapkannya kebijakan *Extended Deterrence* oleh aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan tepatnya pada saat Perang Dingin sudah sangat kompleks dan pola hubungan yang terbentuk dominan ke arah *enmity* atau permusuhan, hal ini dipengaruhi adanya beberapa faktor yaitu faktor sejarah, persaingan ekonomi, perbedaan ideology hingga masalah teritorial yang tidak ada habisnya.

Setelah kebijakan *Extended deterrence* tersebut diterapkan dapat dilihat berdasarkan respon negara-negara Asia Timur khususnya negara yang memiliki pengaruh penting di kawasan terhadap adanya kebijakan tersebut, respon negatif (*challenge*) datang dari negara-negara yang memiliki hubungan *enmity* dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan yaitu China dan Korea Utara. Sedangkan respon positif (*support*) datang dari Jepang. Respon-respon yang terjadi tentunya berkaitan erat dengan konsep yang digunakan yaitu *Balance of Power* atau perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh setiap negara yang terlibat yang dipengaruhi adanya *security dilemma* di kawasan Asia Timur tersebut. Keberadaan *Extended Deterrence* membuat kondisi keamanan di kawasan Asia Timur semakin memanas.

Dari penelitian dan pengumpulan data dari tahun 2001-2017, dapat digambarkan mengenai dinamika kebijakan *Extended Deterrence*, pada tahun 1993, setelah Korea Utara keluar dari *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT), negara tersebut melakukan uji coba nuklir di tahun yang sama, walaupun dengan skala yang kecil uji coba nuklir tersebut membawa kekhawatiran besar bagi banyak negara di dunia terutama bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat, sehingga pemerintah Amerika Serikat berinisiatif untuk melakukan upaya pertahanan persuasif dengan melaksanakan sebuah kebijakan bernama *Extended Deterrence*. Kebijakan ini mulai diaplikasikan pada tahun 2001 dalam bentuk latihan militer gabungan sebagai upaya *balance of threat* (Pifer, 2010, pp. 32–33).

Dalam pelaksanaan dan implementasinya sejak tahun 2001-2008, pengaruh dari kebijakan *Extended Deterrence* ini tidak terlalu tampak. Namun, pada tahun 2009 saat diadakan pertemuan kedua negara yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat menyepakati dan menegaskan bahwa kebijakan *Extended Deterrence* sebagai bentuk pertahanan yang masif dan semakin fokus untuk melindungi kepentingan sekutu dari ancaman nuklir Korea Utara. Tidak lama setelah pertemuan itu, tepatnya pada tahun 2010 aliansi Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan di Semenanjung Korea yang pada akhirnya menyebabkan kegelisahan pemerintah Korea Utara sehingga di tahun yang sama negara tersebut melepaskan persenjataan artilerinya ke wilayah kedaulatan Korea Selatan sebagai bentuk respon dari adanya latihan militer gabungan tersebut. Hal ini kemudian direspon oleh Korea Selatan dengan menembakkan misilnya ke arah Korea Utara yang tentunya sangat berbahaya karena dapat menciptakan peperangan yang lebih besar (The Jakarta Post, 2015).

Lebih jauh lagi, kondisi keamanan yang paling menegangkan juga terjadi pada tahun 2017, dimana saat Korea Utara melepaskan rudal balistiknya dan melewati wilayah Okinawa Jepang, menimbulkan banyak ketegangan dan kekhawatiran berbagai negara terutama Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Dalam hal menanggapi hal tersebut aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan pun melakukan balasan dengan melepaskan rudal jarak pendeknya ke Laut Pasifik, hal ini dilakukan untuk menunjukkan pada Korea Utara bahwa mereka juga tidak akan tinggal diam melihat Korea Utara melakukan hal-hal yang melanggar seperti yang telah dilakukan. Mereka berkomitmen untuk saling melindungi dan tak akan segan melakukan serangan pada Korea Utara jika melihat hal tersebut sebagai ancaman. Adanya pelepasan rudal oleh Korea Utara dan direspon balik oleh aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan ini tentunya membawa dampak yang cukup berbahaya, sebab tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan peperangan nuklir yang lebih besar yang melibatkan seluruh negara di kawasan Asia Timur.

Pada akhir kebijakan *Extended Deterrence* diterapkan berdasarkan penelitian ini yaitu adanya sistem THAAD dan balasan nuklir Korea Utara yang dilakukan oleh aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan, fakta yang ditemukan adalah adanya rasa ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang cukup besar antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Extended Deterrence* menjadi salah satu penyebab utama hubungan antara negara-negara Asia Timur menjadi semakin tidak kondusif dan membuat keamanan di kawasan tersebut semakin tidak stabil bahkan hampir memecahkan perang nuklir di tahun 2017 (Artileri, 2015).

Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya negara-negara di kawasan Asia Timur yang melakukan kecaman terhadap aliansi Amerika Serikat, juga melakukan peningkatan terhadap kapabilitas militernya. China dan Korea Utara sebagai negara-negara utama yang sangat keberatan dan khawatir terhadap keberadaan kebijakan *Extended Deterrence* dalam aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan, sehingga terciptanya hubungan yang semakin tegang antara negara-negara tersebut. Rasa curiga yang berlangsung terus-menerus diakibatkan oleh adanya upaya negara untuk mempertahankan diri, sebab usaha yang dilakukan setiap negara bertujuan untuk mempertahankan diri tetapi bagi negara lain hal tersebut adalah ancaman yang nyata. Hal ini membuat kondisi keamanan di kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak terdapat jalan keluar untuk mencapai sebuah peraturan bersama (Baculinao, 2018).

Berdasarkan respon-respon tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Regional Security Complex* bahwa negara-negara di Asia Timur tidak dapat menjalankan sebuah kerjasama komprehensif terutama dengan adanya kebijakan *Extended Deterrence* sebab kebijakan tersebut ternyata menyebabkan *security dilemma* di kawasan Asia Timur. Pola hubungan yang terbentuk lebih dominan *enmity* atau permusuhan, terutama antara Amerika Serikat-Korea Utara, Amerika Serikat-China, hingga Korea Selatan-Korea Utara. Penerapan kebijakan *Extended Deterrence* menyebabkan beberapa negara di kawasan Asia Timur melakukan upaya *balancing* salah satunya dengan meningkatkan kapabilitas militer serta memodernisasi alutsista mereka. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya *Balance of Power* maupun *balance of threat* di kawasan Asia Timur berujung pada *arm race*. Walaupun hingga kini belum ada *arm race* (perlombaan senjata) secara nyata di kawasan Asia Timur, namun kondisi keamanannya sudah terlihat sangat kompleks (Paul, 2004, pp. 9–11).

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan *Extended Deterrence* dalam aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan membawa ketidak harmonisan dan menyebabkan ketegangan yang semakin kompleks berdasarkan pola hubungan *enmity* yang terjadi di antara negara-negara kawasan Asia Timur sehingga sangat jauh untuk mencapai stabilitas keamanan yang baik. Selain respon-respon negatif dari beberapa negara terhadap kebijakan *Extended Deterrence* ini, tidak ditemukan kerjasama yang konkret di kawasan Asia Timur selama kebijakan ini diberlakukan menunjukkan bahwa stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur memang sangat terganggu terutama dengan adanya kebijakan *Extended Deterrence* dalam aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan ini.

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pola hubungan *enmity* yang terjadi antara negara-negara di kawasan Asia Timur yaitu antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang berseberangan dengan China bersama sekutunya pula. Pada inti penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan *Extended Deterrence* dalam aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan di Asia Timur menjadi salah satu faktor utama penghambat terbentuknya pengaturan keamanan bersama di kawasan, dimana dengan adanya pengaturan keamanan tersebut sebuah kawasan akan memiliki stabilitas keamanan yang baik. Namun dengan semakin sulitnya terbentuk organisasi keamanan regional menunjukkan bahwa kondisi keamanan Asia Timur kurang stabil

dan sangat rentan terjadinya krisis keamanan maupun konflik antara negara-negara di kawasan tersebut.

Stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur akan benar-benar tercapai jika negara-negara di kawasan tersebut dapat menghilangkan rasa ego dan rasa saling tidak percaya, selain itu keamanan di Asia Timur akan lebih stabil apabila kebijakan *Extended Deterrence* dan pengaruh hegemoni Amerika Serikat ditiadakan. Dengan terwujudnya hal-hal tersebut, maka akan memudahkan terciptanya rasa saling percaya antara negara-negara kawasan Asia Timur yang berujung pada terbentuknya regionalism di kawasan tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan *Extended Deterrence* sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan oleh aliansi antara Amerika Serikat-Korea Selatan merupakan salah satu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan negara-negara dalam aliansi tersebut. Dalam penerapannya kebijakan *Extended Deterrence* ini menyebabkan semakin memanasnya hubungan di kawasan Asia Timur. Ada beberapa bentuk penerapan kebijakan *Extended Deterrence* yaitu latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan serta sering juga melibatkan negara sekutu lainnya seperti Jepang, pengembangan militer Korea Selatan, THAAD dan balasan Uji Coba Nuklir pada tahun 2017.

Kebijakan *Extended Deterrence* yang diproyeksikan untuk mempertahankan diri dari ancaman nuklir Korea Utara dikatakan membawa hal buruk bagi beberapa negara di kawasan Asia Timur, dan jika dilihat kebijakan ini tentunya membawa pengaruh yang cukup besar terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur terutama jika melihat respon-respon negara di kawasan tersebut. China dan Korea Utara sebagai negara yang memiliki hubungan rivalitas dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang paling banyak memberikan respon terutama Korea Utara sebagai negara yang menyebabkan mengapa kebijakan ini diadakan.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, kebijakan *Extended Deterrence* sebagai kebijakan pertahanan yang membuat kondisi di kawasan menjadi semakin tidak stabil disebabkan oleh adanya pola hubungan *enmity* atau permusuhan yang semakin kompleks di kawasan Asia Timur. Kerjasama komprehensif diantara negara-negara Asia Timur semakin jauh untuk dicapai. Kebijakan ini membawa kekhawatiran dan rasa ketidakpercayaan bagi negara-negara Asia Timur terutama Korea Utara dan China sebagai negara rival dari aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan. Respon-respon negatif dari negara-negara tersebut menunjukkan fakta bahwa yang ada di kawasan Asia Timur hanya sebuah kecurigaan yang disebabkan *security dilemma* sehingga dengan adanya kebijakan ini hampir tidak mungkin akan tercipta sebuah pengaturan bersama atau regionalisme di kawasan Asia Timur sebagai bentuk stabilitas keamanan yang baik di kawasan.

Pada inti penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan *Extended Deterrence* dalam aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan di Asia Timur menjadi salah satu faktor utama penghambat terbentuknya pengaturan keamanan bersama di kawasan, dimana akan berujung pada stabilitas keamanan yang baik, sebab adanya pola hubungan *enmity* yang terjadi di antara negara-negara Asia Timur. Dengan

semakin sulitnya terbentuk organisasi keamanan regional menunjukkan bahwa kondisi keamanan Asia Timur kurang stabil dan sangat rentan terjadinya krisis keamanan maupun konflik antara negara-negara di kawasan tersebut

REFERENSI

- Ahya, H. (2013). *Tentang Korea*. UMM Press. http://eprints.umm.ac.id/21653/2/jiptumpp-gdl-triharyati-38863-2-babi.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwi3_Z6404vhAhVFuo8KHTotCWIQFjACegQIChAB&usg=AOvVaw27TBd326qY6I1PAAvKyLSv
- Artileri. (2015). *Sistem Rudal Pertahanan Udara THAAD Amerika Serikat*. Author. <http://www.artileri.org/>
- Baculinao, E. (2018). *These Chinese military innovations threaten U.S. superiority, experts say*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/these-chinese-military-innovations-threaten-u-s-superiority-experts-say-n848596>
- Chalermphanupap, T. (2012). *Towards an East Asia Community: The Journey Has Begun*. ASEANSEC. <http://www.aseansec.org/13202.htm>
- Cruden, M. (2011). *Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific*. Research Commons: University of Waikato. <http://researchcommons.waikato.ac.nz/>
- Irawan, S. (2017). Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara. *Jurnal International & Diplomacy*, 7.
- Mardialina, M. (2014). Hambatan Pembentukan Pengaturan Keamanan di Asia Timur. *JIPOLIS*, 4.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metodologi* (Revisi). LP3ES.
- Meilianawati, S. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat Terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4). [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/17.1102045159 - Selly Meilianawati \(11-01-17-01-57-11\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/17.1102045159-SellyMeilianawati(11-01-17-01-57-11).pdf)
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antar Bangsa* (A. M. Fatwa (trans.); 1st ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- O'Neill, A. (2011). *Extended Nuclear Deterrence in East Asia: redundant or resurgent*. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/InternationalAffairs/2011/87_6oneill.pdf
- Paul, T. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford University Press.

Pifer, S. (2010). U.S. Nuclear And Extended Deterrence: Considerations And Challenges. In *Foreign Policy*.

Smith, S. (2015). *Implications for US Extended Deterrence and Assurance in East Asia*. US-Korea Institute At Sais.

The Jakarta Post. (2015). *S. Korea to resume propaganda war with North after mine blasts*. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/08/10/s-korea-resume-propaganda-war-with-north-after-mine-blasts.html#:~:text=South Korea on Monday ordered,soldiers during a frontier patrol>.

United State Forces Korea. (1953). *Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953*. https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/H_MutualDefenseTreaty_1953.pdf